

ANALISIS SPASIAL EKONOMI MAKRO JAWA TENGAH  
(ANALISIS PDRB TAHUN 1993-2003)

*Spatial Analysis of Macro Economic in Central Java  
(PDRB Analysis in Year 1993 - 2003)*

Oleh:

*Eddy Kiswanto*

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada  
Bulaksumur G7, Telp (0274) 563079 Yogyakarta,  
e-mail: [eddykiswanto@yahoo.com](mailto:eddykiswanto@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*This paper aims to study the spatial analysis macro economics condition in Central Java from 1993-2003 base on PDRB analysis. Central Java stands in the last position in the economic development compared to another provinces in Java. The level of economic in Central Java based on PDRB variable and economic growth is in the lowest category in the comparison with another provinces in Java. This is reason why Central Java is categorized as "LL" (Low low). One of the prime sectors in Central Java is small/medium scale enterprises which is dominated 30 persen of national market, but since the economic crisis stroke in 1997 the manufactur sector, especially industry and processing had colaps. In 1996-1997, the level of manufactuire growth increased to 14.4 percent but then decreased until minus 19.3 percent. This condition caused bankruptcy to many of the industries. The poverty profile in Central Java from 1999-2003 is average 23.3 percent from the total population every years. Central Java stepping to number 2 in level of poverty absolute number 1. In poverty relativity level, Central Java became number 1 in Java from 2002-2003 with the level of poverty reached above the national average. This fact shows the unsuccessfully effort in reducing the poverty level.*

*Keyword: Macro economic, spatial analysis*

**PROFIL WILAYAH JAWA TENGAH**

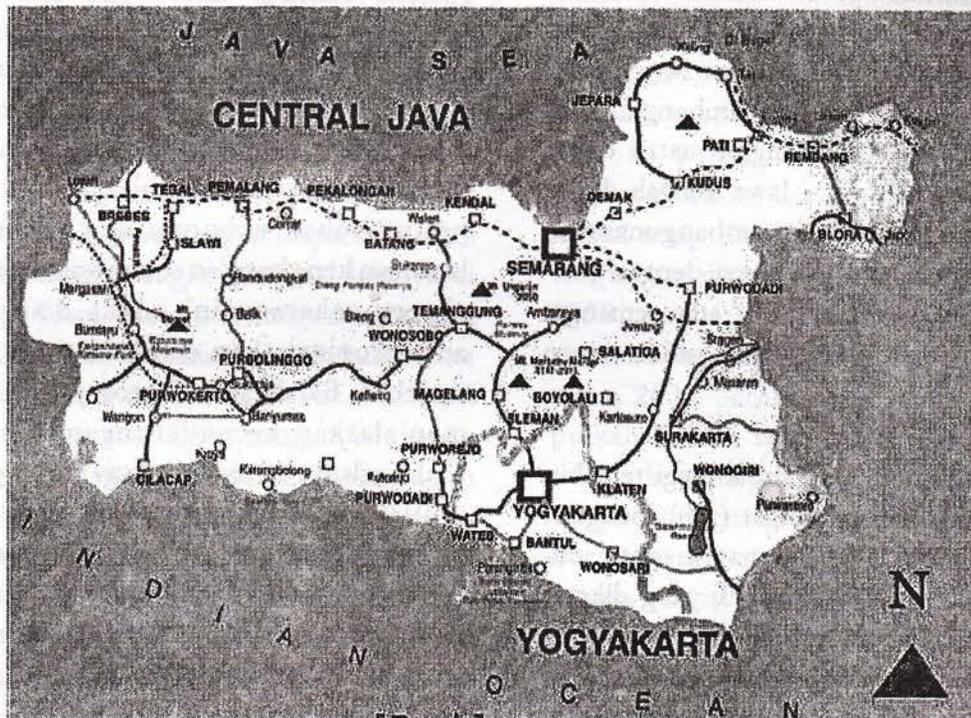
Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Jawa, terletak di antara dua propinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur, terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' hingga 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 KM dan dari utara ke selatan 226 Km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Secara administratif, propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan

6 kota. Luas Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Dari daerah yang ada, 1,00 juta hektar (30,80 persen) adalah lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis (38,26 persen), selainnya berpengairan setengah teknis, tadah hujan, dan lain-lain. Dengan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali adalah sebesar 69,56 persen.

Berikutnya lahan kering yang dipakai untuk tegalan/kebun/ladang/huma sebesar 34,36 persen dari total lahan bukan sawah. Persentase tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan dengan persentase penggunaan bukan lahan sawah yang lain. Menurut Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah berkisar antara  $18^{\circ}\text{C}$  sampai  $28^{\circ}\text{C}$ . Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Sementara itu, suhu rata-rata tanah berumput (kedalaman 5 cm), berkisar antara  $17^{\circ}\text{C}$  sampai  $35^{\circ}\text{C}$ . Rata-rata suhu air berkisar antara  $21^{\circ}\text{C}$  sampai  $28^{\circ}\text{C}$ , sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73 persen sampai 94 persen. Curah hujan terbanyak menurut Stasiun Meteorologi Pertanian terletak pada khusus batas Salatiga sebanyak 3.990 mm, dengan hari hujan 195 hari<sup>1</sup>.

## GAMBARAN UMUM EKONOMI JAWA TENGAH

Jawa Tengah merupakan juru kunci perkembangan ekonomi di antara enam propinsi di Pulau Jawa karena tingkat ekonominya paling rendah dibandingkan dengan propinsi lain di Jawa. Dengan menggunakan variabel PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah dikategorikan dalam kelompok "RR" (rendah-rendah) bersama dengan Propinsi Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Artinya, baik dari segi PDRB per kapita maupun laju pertumbuhan ekonomi, ketiga propinsi tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Dengan demikian, Jawa Tengah adalah yang paling rendah dalam kelompok "RR" tersebut.



Gambar 1. Peta Wilayah Jawa Tengah

<sup>1</sup> Lihat di [www.jateng.go.id](http://www.jateng.go.id)

Propinsi Jawa Barat dan Banten masuk dalam kelompok "TR" (tinggi-rendah) karena jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi berada lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara itu, dari segi PDRB per kapita, kedua propinsi itu berada di bawah rata-rata nasional. DKI Jakarta adalah satu-satunya propinsi dalam kategori "TT" (tinggi-tinggi). PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta memang berada di atas rata-rata nasional. Bahkan PDRB per kapita DKI Jakarta mencapai 400 persen dari PDRB per kapita nasional tahun 2002 (Emyll. 2005).

Gambaran sebagaimana dikemukakan di atas dapat dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan "komparasi" (*comparison model*). Pendekatan modal komparasi ini lazim digunakan dalam analisis regional dan dalam merumuskan strategi pembangunan. Mengetahui dan memahami strategi pembangunan di propinsi-propinsi tetangga justru dapat memperkaya Propinsi Jawa Tengah dalam merumuskan strateginya. Strateginya dapat saja sama dengan propinsi tetangga, tetapi "roh" atau semangat di balik strategi tersebut sudah tentu berbeda.

Bagi Jawa Tengah, strategi tersebut digerakkan oleh semangat (roh) mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu, setiap strategi pembangunan ekonomi yang dikembangkan harus merupakan strategi terobosan yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan strategi yang sama di propinsi tetangga. Jika strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan tidak tepat, maka disparitas antara Jawa Tengah dengan propinsi lain atau dengan nasional akan

semakin melebar. Apabila Jawa Tengah terus-menerus berada di bawah rata-rata nasional, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita, maka dapat dipastikan Jawa Tengah berada pada posisi tengah-bawah dalam profil pembangunan propinsi-propinsi di Indonesia. Padahal, Jawa Tengah adalah tulang punggung nasional karena menampung 16 persen lebih dari total penduduk Indonesia.

### STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TENGAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2005 diperkirakan mencapai 5,5persen dengan tambahan kesempatan kerja baru 2 juta lapangan kerja. Bahkan diperkirakan target pertumbuhan ekonomi nasional 2005 tersebut akan terlampaui, mengingat pertumbuhan pada tahun 2004 sudah mencapai 5,1 persen dan pertumbuhan nonmigas 5,3 persen. Hampir semua propinsi terutama di Pulau Jawa menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Jika skenario pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja berjalan secara konvensional seperti sekarang ini, maka disparitas antarpropinsi akan cenderung semakin melebar. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan kecenderungan tersebut adalah adanya *absolute advantage* (keunggulan mutlak) yang dimiliki oleh propinsi-propinsi tersebut. Hal ini tampak misalnya, menyangkut infrastruktur ekonomi dan keunggulan lokasi (*location economize*), terutama dalam hubungan dengan sinergi antarpusat ekonomi. Dalam hubungan ini, Jawa Tengah tidak memiliki keunggulan strategis, baik dari segi infrastruktur ekonomi maupun keunggulan lokasi. Jawa Tengah jauh berada di belakang diban-

dingkan dengan lima provinsi lainnya, bahkan dengan DI Yogyakarta yang memiliki jaringan internasional kuat karena *absolute advantage* budaya, sejarah, dan lapangan terbang internasional Adisucipto dengan *network* yang demikian strategis. Salah satu yang selalu diprimadonakan oleh Jawa Tengah adalah kekuatan dalam bidang UKM yang menguasai kurang lebih 30 persen UKM nasional. Sudah tentu hal ini bukan merupakan *absolute advantage*, tetapi lebih merupakan pilihan dalam peluang yang terbatas.

Jika saja ada peluang yang lebih terbuka, maka pilihan terhadap UKM menjadi salah satu alternatif saja. UKM lebih merupakan reaksi spontan masyarakat agar bertahan hidup dan bukan digerakkan oleh suatu skenario strategis. Pertanyaan mendasar yang harus direnungkan oleh Jawa Tengah ialah "skenario" strategis pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja seperti apakah yang dianut Jawa Tengah yang membedakannya dari propinsi lainnya di Pulau Jawa? Sebab bila skenarionya sama seperti di provinsi lain, maka kecenderungan disparitas antara Jawa Tengah dengan propinsi lainnya di Pulau Jawa, bahkan dengan rata-rata nasional akan semakin melebar, baik secara absolut maupun secara relatif. Skenario eksplisit tersebut dapat menjadi *core competence* Jawa Tengah dalam persaingan pembangunan, terutama antarpropinsi di Pulau Jawa. Spirit atau roh dibalik strategi tersebut yang dituangkan dalam skenario yang eksplisit dapat membedakan Jawa Tengah dengan propinsi lain, betapa pun payung strateginya sama.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 1999 yang sebesar 3,49 persen berada jauh di atas rata-rata nasional yang hanya

0,79 persen. Perbedaan yang demikian mencolok ini disebabkan pada masa puncak krisis ekonomi nasional yang juga menimpa Jawa Tengah, justru UKM Jawa Tengah bangkit. Kebangkitan UKM ini bukan lahir dari dorongan suatu strategi khusus, tetapi lahir sebagai reaksi spontan masyarakat dalam menanggapi situasi krisis yang terjadi dan untuk bertahan hidup. Hal ini terbukti ketika ekonomi Indonesia mulai membaik, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selalu berada di belakang pertumbuhan ekonomi nasional mulai tahun 2000 sampai 2004.

## INVESTASI DAN EKSPOR

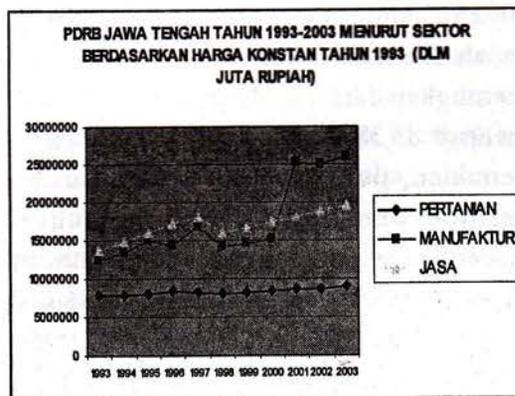
PDRB Jawa Tengah dari segi penggunaannya menunjukkan ketimpangan struktur ekonomi yang cukup tajam, bahkan ketimpangan tersebut antara 1998-2002 menunjukkan struktur yang semakin lemah. Dominasi ekonomi konsumtif terus meningkat dari 70,74persen tahun 1998 menjadi 83,38persen tahun 2002. Dengan demikian, peningkatan produksi dalam periode pemulihan ekonomi banyak disedot ke sektor konsumsi. Pembentukan modal tetap (investasi) hanya berjalan di tempat, yakni rata-rata 16 persen. Tahun 1998, porsi investasi mencapai 20,48 persen turun menjadi 16,32 persen pada tahun 2002. Secara sepintas dapat disimpulkan bahwa selama periode tersebut tidak ada strategi pembangunan ekonomi yang bersifat intervensi terhadap tren yang berjalan secara spontan sebagaimana adanya selama ini.

Dari sisi ekspor netto juga menunjukkan ketidakstabilan. Pada tahun 2000 ekspor netto yang sebesar hampir 9 persen, meningkat menjadi 17,51 persen tahun 2001, dan turun menjadi 14 persen pada tahun 2002. Profil ini pun menunjukkan

tidak ada atau lemahnya strategi perdagangan ekspor-impor Jawa Tengah. Salah satu, bahkan usaha yang utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja ialah memacu investasi dan ekspor. Kedua-duanya memiliki *multiplier effect* terhadap perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, peningkatan investasi dan ekspor merupakan koridor utama menuju pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan penduduk.

### ANALISIS PDRB JAWA TENGAH DARI TAHUN 1993-2003

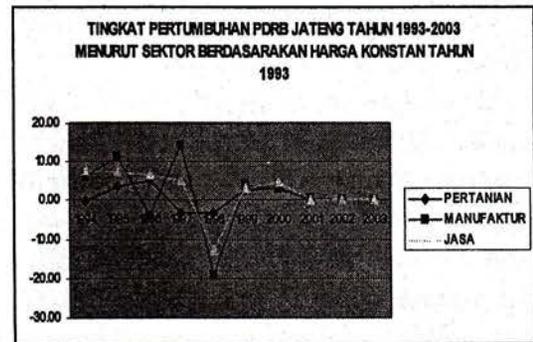
#### PDRB Jawa Tengah Tahun 1993-2003 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993



Grafik 1



Grafik 2



Grafik 3

Proporsi PDRB Jawa Tengah dari tahun 2001-2003 menunjukkan sektor manufaktur merupakan penyumbang terbesar dibandingkan dengan pertanian dan jasa semenjak berakhirnya krisis ekonomi tahun 1997. Pada grafik 1 terlihat mulai tahun 2001 hingga tahun 2003 sektor manufaktur telah mengambil alih sektor jasa sebagai penyumbang terbesar. Hal ini sangat terkait dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi secara nasional walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih tetap berada di bawah rata-rata nasional. Sektor jasa sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB dari tahun 1993-2000 terutama ditopang oleh subsektor perdagangan, restoran, dan hotel. Hanya saja dengan membaiknya kondisi ekonomi perlahan-lahan sektor perdagangan digeser oleh sektor manufaktur. Pertanian tidak menunjukkan kenaikan yang berarti, bahkan dapat dikatakan cenderung stagnan dari tahun ke tahun dan jika dilihat dari persentasenya, rata-rata hanya mencapai 20 persen per tahunnya.

Satu hal yang menarik jika diamati antara tahun 1997-1998 pada saat terjadinya krisis ekonomi adalah adanya penurunan yang tidak drastis dialami oleh sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor yang paling kecil terkena dampak krisis ekonomi. Tahun 1996-1997 sektor

Tabel 1 Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Sumbangan Subsektor Pertanian Untuk PDRB Jawa Tengah Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993

Subsektor Pertanian	1996	Pertumbuhan 1996-1997 (dlm persen)	1997	Pertumbuhan 1997-1998 (dlm persen)	1998
Tanaman bahan makanan	5.397.412	-2,4	5.268.134	2,1	5.380.042
Tanaman perkebunan	615.823	1,4	624.500	-20,5	496.475
Peternakan	1.363.807	-0,2	1.360.569	-16,9	1.130.545
Kehutanan	562.822	-18,2	460.392	-12,7	402.047
Perikanan	548.108	-8,3	502.432	5,8	531.522

pertanian sudah menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan mencapai -3,3 persen, dan pada saat krisis hanya sedikit mengalami penurunan menjadi 3,5 persen. Pada tabel di bawah ini tampak pengaruh krisis ekonomi terhadap sektor pertanian dirinci menurut subsektor.

Subsektor pertanian yang mengalami imbas paling besar dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997-1998 adalah tanaman perkebunan dengan tingkat pertumbuhan mencapai minus 20,5 persen. Subsektor pertanian yang justru menikmati berkah dengan adanya krisis ekonomi adalah perikanan. Pada tahun 1996-1997 sektor ini mencatat pertumbuhan minus, tetapi pada saat datang krisis ekonomi justru mencatat pertumbuhan paling besar dibandingkan dengan subsektor lainnya yang mencapai 5,8 persen.

Sektor yang merasakan dampak paling besar dari adanya krisis ekonomi adalah sektor manufaktur, terutama industri dan pengolahan. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai sentra industri manufaktur yang berorientasi ekspor sehingga ketika terjadi krisis ekonomi, banyak sekali order dari luar negeri yang dibatalkan. Hal ini menyebabkan banyak usaha industri manufaktur tersebut yang gulung tikar. Di sisi yang lain,

banyak UKM di Jawa Tengah justru menikmati dampak adanya krisis karena nilai ekspor barang menjadi semakin meningkat karena tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Hanya saja hal ini tidak dapat menolong pertumbuhan sektor manufaktur secara umum yang ditandai dengan penurunan kontribusinya bagi PDRB Jawa Tengah. Jika dilihat ke belakang sebelum terjadinya krisis ekonomi, pada periode 1996-1997 tingkat pertumbuhan sektor manufaktur mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 14,4 persen, tetapi ketika krisis terjadi turun sangat drastis dengan pertumbuhan minus 19,3 persen. Tabel di bawah ini memberikan gambaran pengaruh krisis ekonomi terhadap sektor manufaktur yang dirinci menurut subsektor.

Subsektor yang mengalami pukulan paling telak dengan adanya krisis ekonomi adalah bangunan. Hal ini tidaklah aneh karena ketika terjadi krisis ekonomi semua harga bahan bangunan melonjak sangat tajam sehingga banyak proyek bangunan yang terpaksa ditunda, bahkan tidak jadi dilaksanakan. Penurunan subsektor bangunan tergolong cukup besar karena mencapai minus 32,1 persen. Sektor jasa juga terkena imbas cukup besar dari krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menyebabkan tingkat

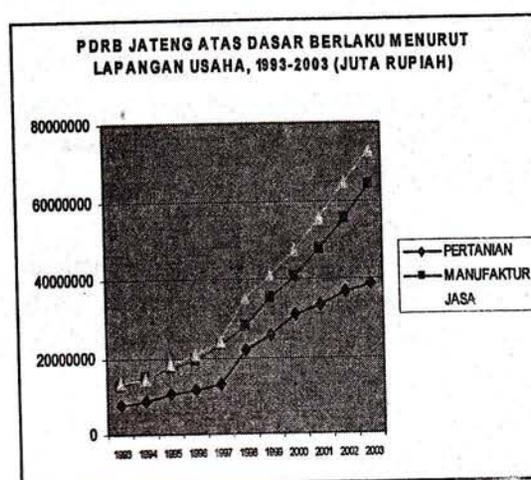
Tabel 2 Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Sumbangan Subsektor Manufaktur Untuk PDRB Jawa Tengah Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993

Subsektor manufaktur	1996	Pertumbuhan 1996-1997 (dlm persen)	1997	Pertumbuhan 1997-1998 (dlm persen)	1998
Pertambangan dan penggalian	527.557	11,3	587.427	-7,1	545.663
Industri pengolahan	13.327.648	2,9	13.709.758	-14,6	11.707.062
Listrik, gas dan air bersih	346.866	13,5	393.557	3,6	407.880
Bangunan	2.011.485	6,4	2.139.684	-32,1	1.452.846

pertumbuhan untuk menyumbang PDRB turun menjadi minus 12,9 persen. Hal ini dipicu oleh lesunya berbagai bisnis dan melonjaknya berbagai harga barang dan tarif angkutan, perdagangan, dan pariwisata yang juga anjlok pada saat terjadinya krisis ekonomi.

Jika diamati masing-masing subsektor dari sektor jasa semuanya mengalami penurunan karena adanya krisis ekonomi. Subsektor yang paling parah adalah keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang mengalami penurunan hingga 34,2 persen. Melemahnya nilai tukar rupiah sampai pada titik terendah pada awal tahun 1998 yang pernah mencapai Rp 15.000,00 terhadap mata uang dolar Amerika menyebabkan subsektor keuangan, persewaan bangunan, dan jasa perusahaan sepi order.

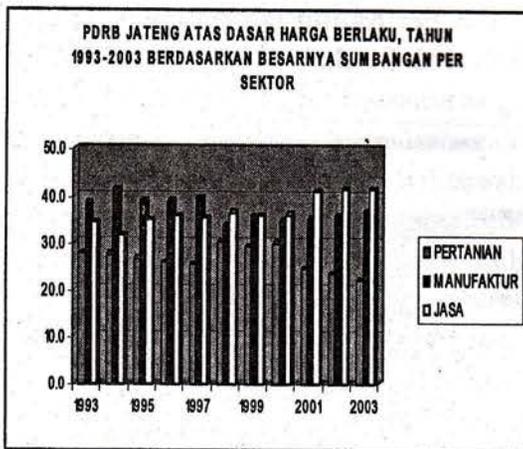
PDRB Jawa Tengah Tahun 1993-2003 Berdasarkan Harga Berlaku



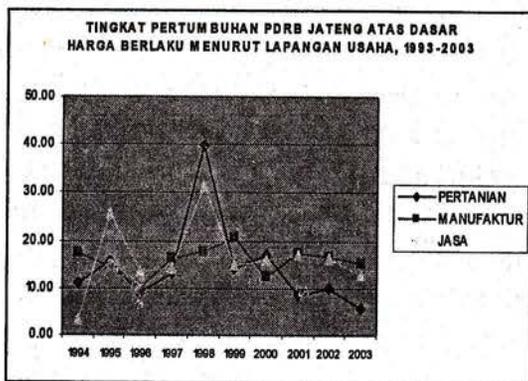
Grafik 3

Tabel 3 Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Sumbangan Subsektor Jasa Untuk PDRB Jawa Tengah Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993

Subsektor Jasa	1996	Pertumbuhan 1996-1997 (dlm persen)	1997	Pertumbuhan 1997-1998 (dlm persen)	1998
Perdagangan, hotel, dan restoran	9.034.330	6,4	9.612.930	-9,0	8747846
Pengangkutan dan komunikasi	1.705.242	3,6	1.766.846	-0,1	1765266
Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan	2.114.567	8,0	2.283.522	-34,2	1502667
Jasa-jasa	4.306.569	2,6	4.420.089	-9,6	3995962



Grafik 4



Grafik 5.

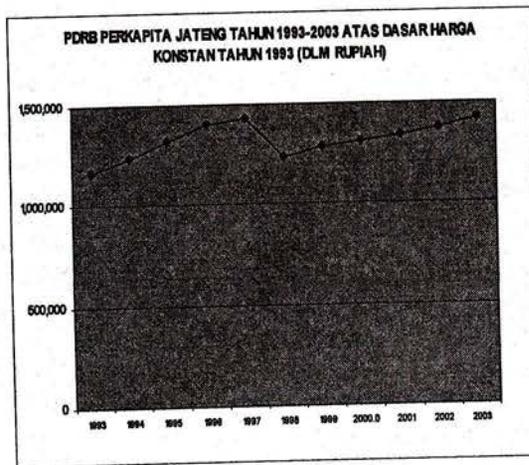
PDRB Jawa Tengah jika diukur berdasarkan harga yang berlaku berbeda dibandingkan dengan harga konstan tahun 1993, ketiga sektor memberikan kontribusi dengan kisaran yang hampir sama. Tren dari ketiga sektor, jika diamati dari rentang waktu 1993-2003, justru mengalami kenaikan secara absolut setiap tahunnya. Hasil yang perlu mendapatkan perhatian adalah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998, ketiga sektor justru mencatat kenaikan yang dapat dikatakan luar biasa. Pertanian merupakan sektor yang mengalami kenaikan luar biasa dalam menyumbang PDRB bagi Jawa Tengah, pada saat krisis terjadi justru mengalami kenaikan yang mencapai 39,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Demikian pula dengan sektor jasa yang mencatat pertumbuhan sebesar 31,1 persen, sedangkan sektor manufaktur hanya sedikit mengalami kenaikan menjadi 17,7 persen. Dimungkinkan pada saat terjadi krisis ekonomi banyak orang yang kembali ke sektor pertanian dan sektor jasa karena adanya PHK atau usahanya gulung tikar.

Penurunan pertumbuhan justru terjadi pada tahun 1998-1999, dengan sektor pertanian dan jasa mengalami penurunan mencapai 50 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya, sementara sektor manufaktur mencatat kenaikan yang cukup lumayan dengan capaian 20,5 persen. Pada tahun 1999-2000 kembali terjadi kenaikan pertumbuhan pada sektor pertanian dan jasa dan sektor manufaktur kembali mengalami penurunan yang drastis. Asumsi yang mungkin bisa diajukan untuk menjelaskan fenomena ini mengapa pertanian mengalami peningkatan adalah keberhasilan panen pada periode tersebut dan sektor jasa karena meningkatnya arus perdagangan dan pariwisata ke Jawa Tengah. Pada rentang waktu 2000-2003 ketiga sektor justru menunjukkan penurunan secara bersamaan terutama pertanian dibanding dengan periode sebelumnya.

#### PDRB Per Kapita Jawa Tengah Tahun 1993-2003 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993 (Rupiah)

PDRB per kapita Jateng pada periode 1993-1997 mengalami kenaikan yang cukup besar dengan rata-rata kenaikan 4,5 persen per tahunnya dan puncaknya terjadi pada tahun 1997 yang mencapai Rp 1.401.996, 00. Adanya krisis ekonomi 1997-1998 menyebabkan PDRB per kapita turun sangat drastis dan pertumbuhannya menjadi minus 13 persen. Mulai tahun 1998 secara berangsur-angsur kondisi PDRB per kapita Jateng semakin

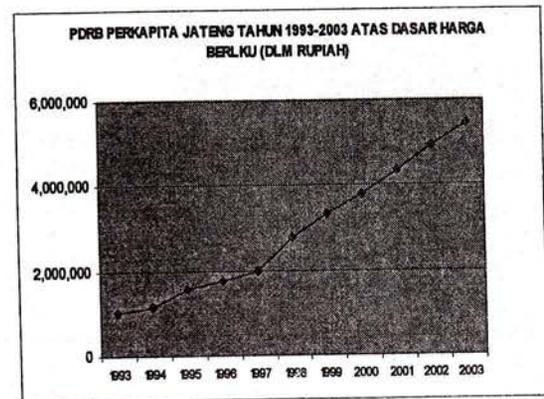


Grafik 6

membalik. Hal ini menjadi sinyal bahwa ekonomi makro mulai membaik dan tahun 2003 PDRB per kapita Jawa Tengah kembali mencapai angka tertinggi sebagaimana yang pernah dicapai pada tahun 1997.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Jawa Tengah dikategorikan sebagai kelompok RR (rendah-rendah) jika diukur dengan variabel PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi karena berada di bawah rata-rata nasional. Tabel 4 di bawah memberikan gambaran bagaimana posisi Jawa Tengah dibandingkan dengan propinsi lain di Pulau Jawa yang ternyata menduduki posisi paling akhir jika dilihat dari PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 1993. Selain Jawa Tengah, PDRB per kapita masing-masing propinsi lain, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIY juga berada di bawah rata-rata nasional. Hanya DKI dan Bali yang nilai PDRB per kapitanya melebihi rata-rata nasional dari tahun 1993-2003. Rata-rata PDRB per kapita nasional berdasarkan harga berlaku tahun 1993 mengalami penurunan yang cukup besar pada masa krisis ekonomi tahun 1997, pertumbuhannya turun hingga mencapai minus 17 persen. Angka penurunan ini melebihi penurunan yang dialami oleh Jateng yang mencapai minus 13 persen.

### PDRB Per Kapita Jawa Tengah Tahun 1993-2003 Berdasarkan Harga Berlaku

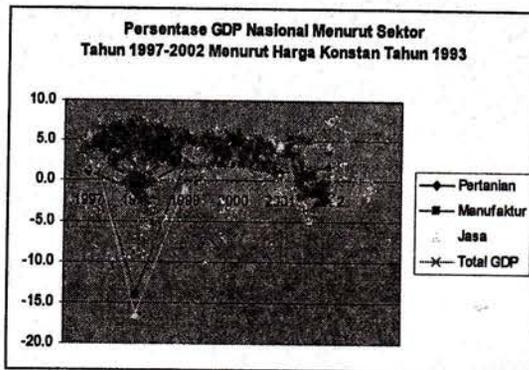


Grafik 7

Apabila diamati menurut harga berlaku, PDRB per kapita Jawa Tengah menunjukkan tren yang selalu naik dari tahun 1993-2003 dengan pertumbuhan rata-rata 19 persen per tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1997 yang dapat mencapai 38 persen dan terendah pada tahun 2002 yang hanya mencapai 11 persen. Data PDRB per kapita menurut harga berlaku ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan data PDRB per kapita menurut harga konstan tahun 1993 karena adanya perbedaan nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang terjadi. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku kurang sensitif untuk menganalisis dampak krisis ekonomi terhadap kondisi perekonomian baik untuk propinsi maupun nasional. Hal ini disebabkan data yang ada memperlihatkan bahwa pada saat krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997-1998 justru terjadi pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Tengah yang cukup besar, yaitu 20 persen. Untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat, biasanya digunakan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 1993 karena lebih sensitif untuk melihat pengaruh dampak terhadap kondisi makro ekonomi.

Seperti halnya pada PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 1993, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah menurut harga berlaku juga dikategorikan sebagai kelompok paling rendah karena nilainya berada di bawah rata-rata nasional. Tabel 5 di bawah memberikan gambaran bagaimana posisi Jawa Tengah dibandingkan dengan propinsi lain di Pulau Jawa. Tampak hasilnya tidak berbeda, dimana Jawa Tengah tetap menduduki posisi paling bawah jika dibandingkan dengan propinsi lain di Jawa. Provinsi yang melebihi rata-rata nasional hanya DKI Jakarta saja, sedangkan Bali berada di bawah rata-rata nasional. Padahal jika dilihat PDRB per kapita Bali berdasarkan harga konstan tahun 1993, angkanya melebihi rata-rata nasional.

### Gross Domestik Product (GDP) Nasional Tahun 1997-2002



Grafik 6

Tabel 4 Persentase GDP Menurut Sektor Tahun 1997-2002 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993

Sektor	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Pertanian	1.0	-1.3	2.2	1.9	1.0	1.7
Manufaktur	5.2	-14.0	2.0	5.9	3.3	3.7
Jasa	5.6	-16.5	-1.0	5.2	4.6	4.4
<b>Total GDP</b>	<b>4.7</b>	<b>-13.1</b>	<b>0.8</b>	<b>4.9</b>	<b>3.4</b>	<b>3.7</b>

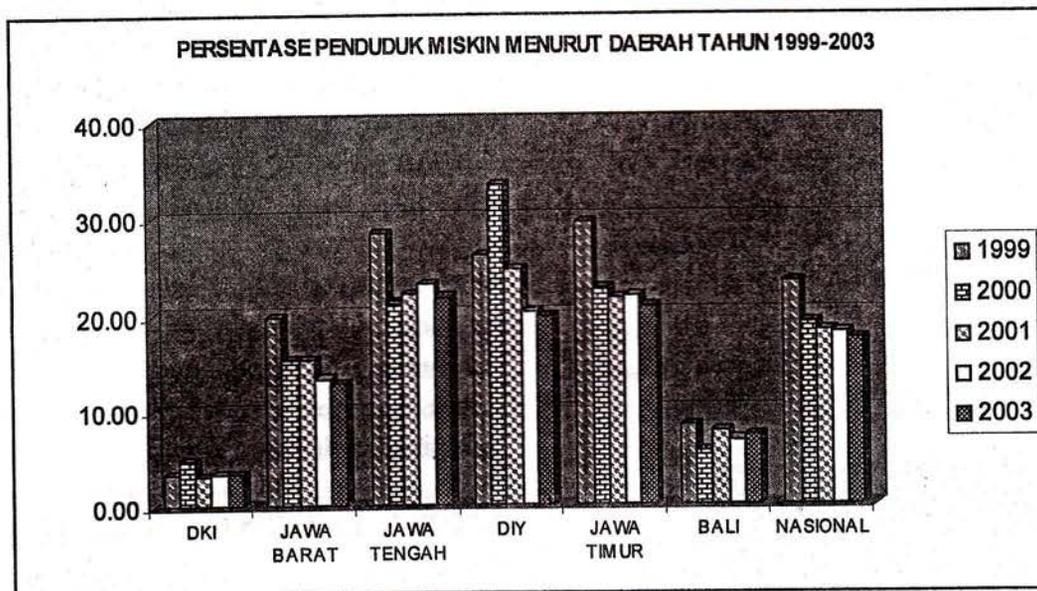
Dampak krisis ekonomi tahun 1997-1998 terhadap GDP dapat dilihat dari besarnya persentase sumbangan sektor pertanian, manufaktur, dan jasa. Berbeda dengan pola PDRB di Jawa Tengah yang sektor manufakturnya paling terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi, secara nasional sektor yang mengalami dampak paling besar adalah sektor jasa. Penurunan yang terjadi pada sektor jasa mendekati angka 17 persen (16.5 persen). Jika diamati selama kurun waktu 5 tahun setelah krisis ekonomi terjadi, sektor jasa mengalami peningkatan pertumbuhan yang paling tinggi mengungguli sektor manufaktur dan pertanian. Sektor pertanian memiliki elastisitas yang tinggi pada saat terjadi krisis ekonomi. Hal ini tampak dari kecilnya penurunan yang dialami oleh sektor pertanian jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor pertanian hanya mengalami penurunan 1,3 persen. Hanya saja selama kurun 5 tahun setelah krisis, sektor pertanian cenderung stagnan.

### PROFIL KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

Penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali dilakukan oleh BPS pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-

Tabel 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah Dibandingkan dengan Propinsi lain di Pulau Jawa Tahun 1999-2003 (dlm ribuan)

PROVINSI	1999	persen	2000	persen	2001	persen	2002	persen	2003	persen
DKI	379,6	3.39	416,1	4.96	247,5	3.14	286,9	3.42	294,1	3.42
JAWA BARAT	8,393,4	19.78	6,658,4	15.40	5,532,3	15.34	4,938,2	13.38	4,889,9	12.90
JAWA TENGAH	8,755,4	28.46	6,513,6	21.16	6,856,7	22.07	7,308,3	23.06	6,980,0	21.78
DIY	789,1	26.00	1,035,8	33.39	767,6	24.53	635,7	20.14	636,8	19.86
JAWA TIMUR	10,286,5	29.47	7,845,4	22.70	7,508,3	21.64	7,701,2	21.91	7,578,4	20.93
BALI	257,8	8.53	176,8	5.68	248,4	7.87	221,8	6.89	246,1	7.34
NASIONAL	47,974,6	23.43	38,743,7	19.14	37,867,0	18.41	38,394,0	18.20	37,339,4	17.42



Grafik 7

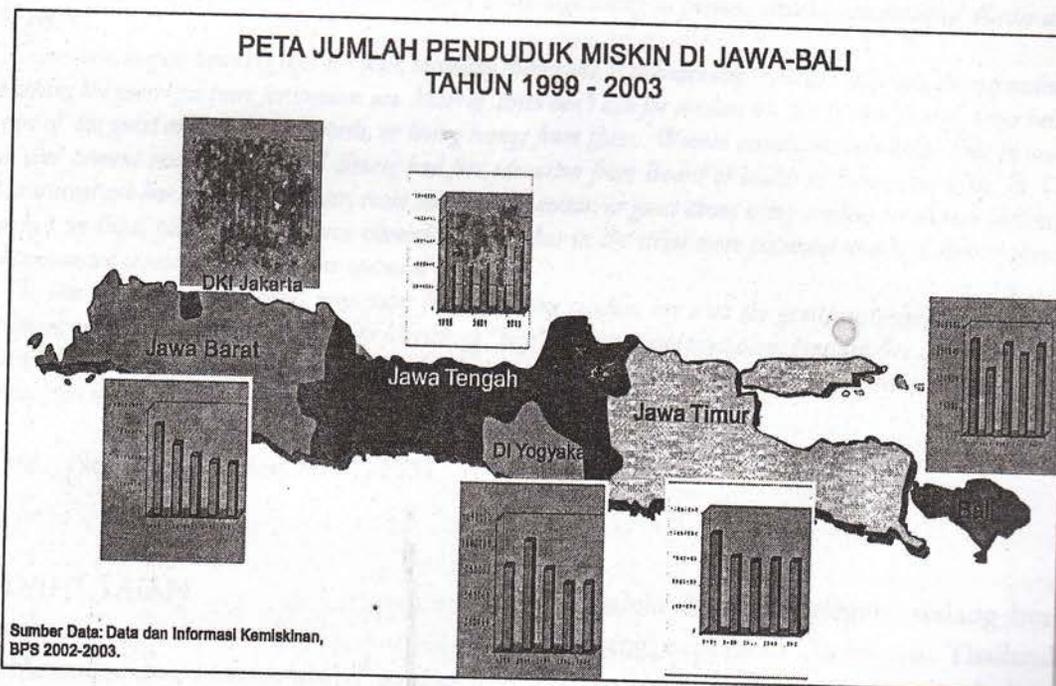
1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Susenas. Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan oleh BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama, yaitu *basic needs*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non-makanan yang bersifat mendasar (BPS, 2002).

Profil penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun 1999-2003 rata-rata persentase per tahunnya adalah 23,3 persen dari total penduduk. Secara absolut jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menduduki peringkat kedua terbanyak dibandingkan dengan propinsi lain di Pulau Jawa, sedangkan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur. Pada tabel di bawah dapat diketahui pula bahwa angka kemiskinan relatif di Jawa Tengah pada tahun 2002-2003 menempati angka tertinggi dibandingkan dengan propinsi lain

di Jawa, bahkan melebihi angka rata-rata nasional, padahal dari tahun 1999-2001 Jawa Tengah masih berada di bawah Jawa Timur. Hal ini menunjukkan angka kemiskinan masih cukup tinggi dan dapat ditarik kesimpulan bahwa program untuk mengentaskan kemiskinan kurang berjalan secara efektif di Jawa Tengah.

Dari hasil analisis secara keseluruhan, Jawa Tengah menempati posisi terbawah dibandingkan propinsi lain di Pulau Jawa, baik ditinjau dari variabel PDRB, pertumbuhan ekonomi, maupun jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, pemerintah Jawa Tengah harus lebih serius dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan kemudahan untuk melakukan usaha. Industri kecil dan kerajinan merupakan produk utama Jawa Tengah yang mempunyai nilai jual cukup tinggi dan sudah dikenal di luar negeri. Komitmen pemerintah propinsi

dengan sungguh-sungguh dalam upaya memajukan sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) pada gilirannya akan membawa berbagai dampak positif, seperti penyerapan tenaga kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalan dengan propinsi lain, terutama yang di Jawa yang semakin maju, sehingga Jawa Tengah tidak menjadi inferior atas kekurangan dirinya. Perumusan strategi pembangunan Jawa Tengah harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan "komparasi" (*comparison model*). Pendekatan modal komparasi ini bertujuan untuk memahami strategi pembangunan di propinsi-propinsi lain sehingga dapat memperkaya Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan strategi pembangunannya. Semangat untuk dapat bersaing dengan daerah lain harus dimaknai untuk memajukan masyarakatnya sehingga dapat berdiri sejajar.



## DAFTAR PUSTAKA

- BPS.1995. *PDRB Menurut Propinsi Tahun 1993-1995*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.1995. *PDRB Per kapita Menurut Propinsi Tahun 1993-1995*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.1998. *PDRB Menurut Propinsi Tahun 1995-1998*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.1998. *PDRB Per kapita Menurut Propinsi Tahun 1995-1998*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.2000. *PDRB Menurut Propinsi Tahun 1997-2000*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.2000. *PDRB Per kapita Menurut Propinsi Tahun 1997-2000*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.2002. *PDRB Menurut Propinsi Tahun 1999-2002*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.2002. *PDRB Per kapita Menurut Propinsi Tahun 1999-2002*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.2002. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.2003. *PDRB Per kapita Menurut Propinsi Tahun 2000-2003*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.2003. *PDRB Menurut Propinsi Tahun 2000-2003*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_.2003. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Emyll, Alex. 2005. *Strategi Pembangunan Ekonomi Jateng*. Suara Merdeka, 26 Januari